

ABSTRAK

PENERAPAN DOKTRIN FREEDOM OF PANORAMA SEBAGAI PEMBATASAN HAK CIPTA DALAM RUANG PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Oleh

CYNTHIA LOUREN NATALIA

Perkembangan teknologi digital yang memungkinkan penyebaran foto dan video secara cepat menimbulkan permasalahan hukum baru terkait penggunaan karya cipta yang berada di ruang publik, seperti bangunan dan karya seni lainnya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mengatur secara eksplisit mengenai doktrin *Freedom of Panorama*, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dan ketidakpastian. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan yaitu tentang pengaturan terkait doktrin *Freedom of Panorama* di Indonesia, dan penerapan doktrin *Freedom of Panorama* sebagai pembatasan hak cipta dalam ruang publik menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menilai kesesuaian norma, serta urgensi pembentukan regulasi baru terkait *Freedom of Panorama*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta di Indonesia belum mengadopsi doktrin *Freedom of Panorama*, sehingga penggunaan karya cipta di ruang publik terutama untuk tujuan komersial masih berpotensi dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta hanya memberikan pengecualian terbatas untuk penggunaan non komersial. Perbandingan dengan negara seperti Jerman dan Inggris menunjukkan bahwa pengaturan yang tegas mengenai *Freedom of Panorama* dapat memberikan kepastian hukum serta menjaga keseimbangan antara hak eksklusif pencipta dan hak publik atas ruang terbuka. Oleh karena itu, Indonesia perlu membentuk norma baru yang mengatur secara jelas *Freedom of Panorama* sebagai salah satu bentuk pembatasan hak cipta dalam ruang publik.

Kata Kunci : *Freedom of Panorama, Hak Cipta, Ruang Publik.*

ABSTRACT

APPLICATION OF THE FREEDOM OF PANORAMA DOCTRINE AS A LIMITATION ON COPYRIGHTS IN PUBLIC SPACE ACCORDING TO LAW NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHTS

By

CYNTHIA LOUREN NATALIA

The advancement of digital technology, which enables the widespread distribution of photographs and videos, has created new legal challenges concerning the use of copyrighted works located in public spaces, such as buildings and other artistic creations. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright does not explicitly regulate the doctrine of Freedom of Panorama, resulting in a legal vacuum and uncertainty for the public, photographers, and content creators who utilize artistic works visible in open public areas. Based on these conditions, this research formulates two central issues is about the framework governing the Freedom of Panorama doctrine is shaped in Indonesia, and the Freedom of Panorama doctrine is applied as a limitation on copyright in public spaces under the Indonesian Copyright Law.

This study employs a normative juridical research method using a statutory approach and a comparative approach. The research relies on primary, secondary, and tertiary legal materials collected through library research, which are then analyzed qualitatively to assess normative suitability, the existence of legal gaps, and the urgency of establishing a legal framework governing Freedom of Panorama.

The results of the study show that Indonesia's copyright system has not yet adopted the Freedom of Panorama doctrine, creating the possibility that the use of public space artworks particularly for commercial purposes may still constitute copyright infringement. Article 43 (d) of the Copyright Law provides only limited exceptions for non-commercial purposes. Comparative analysis with countries such as Germany and the United Kingdom demonstrates that explicit regulation of Freedom of Panorama ensures legal certainty and balances creators' exclusive rights with public rights over open spaces. Therefore, it is necessary for Indonesia to develop a clear legal norm regulating Freedom of Panorama as a form of copyright limitation in public spaces.

Keywords: Freedom of Panorama, Copyright, Public Space.